

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teoritis

Kajian teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori tentang karya sastra novel, unsur intrinsik dan ekstrinsik serta pemanfaatannya sebagai bahan ajar.

2.1.1 Hakikat Sastra

Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan, sebuah kreasi bukan semata-mata sebuah imitasi (Luxembourg, 2011, hlm. 72). Karya sastra sebagai wujud dan hasil karya kreatif, pada hakikatnya merupakan suatu media yang mengungkapkan kehidupan manusia melalui bahasa. Oleh karena itu, sebuah karya sastra biasanya memuat topik-topik yang berkaitan tentang permasalahan yang meliputi kehidupan manusia. Kemunculan sastra lahir dilatarbelakangi adanya dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan eksistensi dirinya (Sangidu, 2011, hlm. 60).

Karya sastra adalah karya yang berdiri sendiri, yang terlepas dari aspek di eksternal karya tersebut. Dia memiliki rangka dan bentuknya sendiri, yang tertata dan terhubung dengan baik. Jika salah satu dihilangkan, maka karya tersebut akan kehilangan integritasnya. Karya sastra juga ditentukan oleh bentuk dan isi yang koheren. Karya sastra tersusun dari unsur yang saling jalin-menjalin, terstruktur, sehingga tidak satupun yang tidak fungsional dalam keseluruhannya (Rahim, 2013, hlm. 146).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa karya sastra adalah media yang digunakan oleh ide seorang sastrawan yang didasari oleh sebuah konsep yang bersumber, pengalaman fisik, pengalaman batin, dan pengalaman budaya.

2.1.2 Pengertian Novel

Dilihat dari sudut istilah, kata novel berasal dari kata latin “novellus” yang diturunkan pula dari kata “novus” yang berarti baru. Dikatakan baru karena jika dibandingkan dengan jenis sastra lainnya, seperti puisi, drama, dan lain-lain, maka jenis novel muncul kemudian (Nurgiyantoro, 2015, hlm. 11).

Menurut Nurgiyantoro (1995, hlm. 11) novel mengungkapkan gambaran sisi kehidupan manusia dengan memperlihatkan watak, keadaan waktu yang berbeda setiap pelaku (tokoh) tertentu sehingga menimbulkan kesan bagi pembaca.

Novel mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak, melibatkan sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, serta lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan yang kompleks.

Novel dianggap sebagai dokumen atau kasus sejarah, sebagai pengakuan (karena ditulis dengan sangat meyakinkan), sebagai sebuah cerita kejadian sebenarnya, sebagai sejarah hidup seseorang dan zamannya (Wellek dan Warren, 1952, hlm. 276). Dalam *The American College Dictionary* Rahim (2013, hlm. 148) disampaikan bahwa “novel adalah suatu cerita prosa fiksi dengan panjang tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak serta adegan kehidupan nyata yang representatif dalam suatu alur atau keadaan yang agak kacau atau kalut”.

Novel adalah sebuah eksplorasi atau kronik kehidupan; merenungkan dan lukiskan dalam bentuk tertentu, pengaruh, ikatan, hasil, kehancuran, atau terciptanya gerak-gerik manusia (Rahim, 2013, hlm. 149). Novel harus memenuhi syarat: bergantung pada tokoh, menyajikan lebih dari satu efek, menyajikan lebih dari satu emosi (Rahim, 2013, hlm. 149).

Novel adalah prosa rekaan yang menyajikan adegan atau kronik kehidupan manusia melalui gerak para tokoh, yang mengikuti alur tertentu, disertai dengan latar atau serangkaian peristiwa yang tersusun dalam panjang tertentu hingga membentuk suatu cerita (Rahim, 2013, hlm. 149).

Beberapa pendapat tersebut menunjukkan bahwa novel merupakan cerita fiksi yang mencoba merepresentasikan atau menghadirkan kehidupan para tokohnya melalui tindakan-tindakannya. Cerita fiksi bukan hanya sekedar cerita rekaan, tetapi khayalan yang diciptakan oleh pengarangnya adalah suatu kenyataan atau fenomena yang dapat terlihat dan dirasakan.

2.1.3 Unsur-unsur Novel

Novel sebagai karya fiksi terdiri dari berbagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah karya fiksi. Secara garis besar, novel terdiri dari dua unsur, yaitu; (1) elemen dalam (intrinsik) dan (2) elemen luar (eksternal). Dalam menulis suatu cerita baik novel maupun cerpen, hakikatnya memiliki unsur pembangun fiksi yang tetap, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Misalnya (a) tema, (b) plot, (c) *setting*, (d) tokoh dan penokohan, (e) *point of view*, dan (f) bahasa dan *style*. Unsur itu hakikatnya unsur intrinsik sebuah fiksi. Di samping itu, masih ada unsur

lain yakni ekstrinsik fiksi seperti (a) pendidikan, (b) ekonomi, (c) budaya, (d) sosial budaya, (e) politik dan adat, dan lain-lain (Rumah, 2011, hlm. 103).

Novel sebagai satu dari sekian banyak genre sastra mempunyai unsur-unsur pembangun. Unsur pembangun itu juga disebut sebagai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah karya sastra tidak dapat dipisahkan begitu saja karena keduanya saling mempengaruhi (Nurgiyantoro, 1998, hlm. 22-23). Unsur ekstrinsik timbul dari pengaruh luar (ekstrinsik). Pengaruh ekstrinsik ini berasal dari pengarang sebagai unsur penentu cerita. Asal-usul dan lingkungan pengarang sangat berpengaruh terhadap karya sastra yang diciptakannya.

2.1.3.1 Tema

Tema merupakan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks. Sebagai unsur semantis dan yang menyangkut persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan suatu tema dalam cerita, maka terlebih dahulu kita harus menjawab pertanyaan seperti; apakah motivasi tokoh, apa problemnya, dan apa keputusan yang diambil Aminuddin (2011, hlm. 91).

Selain itu, konflik sentral harus diperhatikan. Konflik sentral inilah yang akan mengarah pada apa yang ingin dicari. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tema adalah dasar atau makna cerita. Kemudian dikembangkan dari pandangan hidup dan perasaan si penulis yang membentuk sebuah cerita yang utuh.

2.1.3.2 *Setting*/ latar

Setting/latar yang disebut juga sebagai landas tumpu menyorankan pada pengertian tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Rahim, 2013, hlm. 152). Senada dengan pendapat di atas, *Setting* adalah latar belakang yang membantu kejelasan jalan cerita (Aminuddin, 2011, hlm. 91). *Setting* ini meliputi waktu, tempat, sosial budaya.

Rahim (2013, hlm. 152) mengemukakan bahwa,

“Latar dapat dibedakan tiga unsur pokok yaitu (1) latar tempat, yakni tempat menyusun pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi, (2) latar waktu, latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi, (3) latar sosial,

latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat disuatu tempat yang diceritakan dalam karya sastra”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa setting/latar adalah latar yang terdapat dalam sebuah cerita, baik itu latar tempat, waktu, maupun sosial agar tercipta cerita yang lebih hidup.

2.1.3.3 Penokohan

Penokohan/perwatakan adalah sesuatu yang kehadirannya dalam fiksi sangat penting dan krusial karena tidak mungkin menceritakan tokoh-tokoh untuk membentuk alur. Tokoh dan perwatakan juga mesti memiliki suatu struktur. Perilaku fisik dan mental secara bersama membentuk totalitas perilaku tokoh yang bersangkutan.

Pada sebuah cerita terdapat banyak tokoh dan memiliki peran yang berbeda. Pada dasarnya ada dua kategori tokoh berdasarkan peranannya dalam cerita, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu (Rahim, 2019, hlm. 153). Tokoh utama adalah tokoh yang mempunyai peranan penting dalam sebuah cerita. Peran pembantu adalah tokoh yang peranannya tidak terlalu penting karena hanya melengkapi, melayani, dan mendukung tokoh utama. Untuk mengetahui ciri-ciri tokoh dalam cerita, bisa dilihat dari berapa seringnya tokoh tersebut muncul dalam satu cerita yang sama.

Karakter dipahami sebagai ciri-ciri khas dari pelaku/tokoh yang dikisahkan, seperti akal budi, sikap, tingkah laku pribadi dan jiwa yang membedakannya dengan tokoh-tokoh lain dalam cerita. Karakter pelaku dalam sebuah cerita, maka kita menggunakan alat: (1) bahasa, (2) sikap, (3) kebiasaan, (4) penggambaran miliu, (5) perbincangan pelaku lain tentang dirinya, (6) teman dekat dan musuh-musuhnya (Aminuddin, 2011, hlm. 91).

Berdasarkan perbedaan cara pandang dan penilaian, seorang tokoh dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu: (1) Tokoh utama adalah tokoh yang kisahnya menjadi fokus novel tersebut. (2) Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi dan kita lihat sebagai perwujudan standar dan nilai ideal. (3) Tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. (4) Tokoh sederhana, yaitu tokoh yang mempunyai dan mengungkapkan berbagai aspek kehidupannya, aspek kepribadiannya dan jati dirinya.

2.1.3.4 Alur/plot

Alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai sebuah interelasi fungsional yang sekaligus menandai urutan-urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi (Rahim, 2013, hlm. 155). Senada dengan itu Aminuddin (2011, hlm. 91) mengatakan bahwa “Alur adalah struktur gerak yang terdapat dalam fiksi dan drama”.

Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah novel. Alur dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu alur maju (*progresif*) adalah apabila peristiwa berlangsung secara bertahap dalam urutan kronologis cerita. Kedua alur mundur (*flashback progresif*) yang artinya mengacu pada peristiwa yang sedang berlangsung. Alur/plot menunjukkan peristiwa yang mengandung kontradiksi ataupun menarik bahkan memikat pembaca.

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa alur adalah jalan sebuah cerita yang diatur waktunya dan sangat dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain watak tokoh, pemikiran atau suasana hati tokoh, latar, waktu, dan suasana lingkungan. Alur sebuah novel terdiri dari (1) bagian awal, yaitu situasi yang mulai berkembang sebagai kondisi awal, diikuti oleh kondisi berikutnya, (2) bagian tengah, yaitu keadaan yang bergerak menuju klimaksnya, (3) klimaks, yaitu klimaks peristiwa, (4) akhir, yang mengungkapkan masalah klimaks sebelumnya, dan mulai memperlihatkan jalan keluar atau penyelesaian masalah.

2.1.3.5 Sudut Pandang

Sudut pandang (*point of view*) merupakan strategi, taktik, siasat yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan ceritanya (Aminuddin, 2011, hlm. 91). Dengan kata lain, sudut pandang merupakan bentuk pengarang memposisikan dirinya ke dalam sebuah cerita. Rahim (2013, hlm. 157) mengemukakan antara lain cara pengisahan, yaitu:

- (1) tokoh utama menceritakan dirinya sendiri sendiri. Hal ini bisa dikatakan “aku”,
- (2) cerita itu dapat disalurkan oleh peninjauan yang merupakan seorang partisipan dalam cerita itu,
- (3) pengarang bertindak sebagai peninjau saja,
- (4) cerita dapat dituturkan oleh pengarang sebagai orang ketiga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sudut pandang adalah cara menempatkan diri yang digunakan oleh seorang pengarang untuk menyajikan sebuah cerita dalam sebuah karya fiksi atau novel.

2.1.4 Hakikat Kebudayaan

2.1.4.1 Pengertian kebudayaan

Kebudayaan berasal dari (bahasa sanskerta) buddhaya yang merupakan bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal (Soekanto, 2006, hlm. 174).

Kebudayaan juga acapkali dimaknai sebagai hasil cipta, karsa, dan karya manusia (Syariat, 2006, hlm. 958). Sehingga ketika kaca mata analisis diarahkan pada pengamatan realitas budaya suatu ranah budaya, sungguh sulit untuk meninggalkan akar sejarah peradaban kebudayaan. Bagi seorang ahli antropologi istilah “kebudayaan” umumnya mencakup cara berpikir dan cara berlaku yang telah merupakan ciri khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu. Sehubungan dengan itu maka kebudayaan terdiri dari hal-hal seperti bahasa, ilmu pengetahuan hukum-hukum, kepercayaan, agama, kegemaran makanan tertentu, musik, kebiasaan pekerjaan, larangan-larangan, dan lain sebagainya (Ihromi, 2013, hlm. 7).

Mengemukakan bahwa kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang manapun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan (Ihromi, 2013, hlm. 18). Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah kebudayaan adalah sesuatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan melingkupi suatu ide atau sistem pemikiran dalam pikiran manusia, sehingga budaya bersifat abstrak dalam kehidupan sehari-hari.

Perwujudan kebudayaan ialah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang beradab baik berupa tingkah laku maupun benda-benda nyata, misalnya tingkah laku, bahasa, alat-alat hidup, organisasi sosial, agama, kesenian, dan lain-lain, yang semuanya bertujuan untuk membantu manusia dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat.

2.1.4.2 Unsur-Unsur Kebudayaan

Mengenai unsur-unsur kebudayaan, ada 6 unsur-unsur kebudayaan antara lain; peralatan perlengkapan hidup manusia, sistem mata pencaharian, sistem kekerabatan, sistem perkawinan, bahasa, kesenian (Syariat, 2006, hlm. 456).

A. Peralatan perlengkapan hidup manusia.

Sistem alat dan perlengkapan hidup manusia merupakan cara atau alat yang dikenakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Ratna (dalam Khotimah, 2016, hlm. 215) “Peralatan dan perlengkapan hidup adalah salah satu komponen kebudayaan, yaitu menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan”. Sejalan dengan itu, menurut Nurochim dkk (2017, hlm.27) antropologi juga menjumpai bahwa setiap masyarakat pendukung suatu kebudayaan memiliki kemampuan secara ide hingga melaksanakan kegiatan bersama melahirkan peralatan hidup yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai unsur kebutuhan budaya universal lainnya.

Unsur budaya peralatan dan perlengkapan hidup dapat berupa sub unsur kebudayaan seperti pakaian, tempat tinggal, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, alat transportasi, alat berburu (dalam Devi dkk, 2021, hlm. 130). Senada dengan itu, menurut Liliweri (2019, hlm. 26) “sistem peralatan hidup atau teknologi yang meliputi; produksi, distribusi, transportasi, peralatan, komunikasi, peralatan komunikasi dalam bentuk wadah, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, senjata”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peralatan perlengkapan hidup manusia meliputi pakaian, alat rumah tangga, senjata, transportasi, perumahan dan alat produksi.

B. Sistem Mata Pencaharian

Dalam kehidupan, seseorang tidak dapat memisahkan dirinya dari budaya yang memotivasinya untuk melanjutkan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Kegiatan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat membentuk pola kerja rutin yang dikenal dengan istilah mata pencaharian. Menurut Ratna (dalam Khotimah,

2016, hlm. 42) dalam seluruh kehidupan manusia, mata pencaharian merupakan masalah pokok karena keberlangsungan kehidupan terjadi semata-mata dengan dipenuhinya berbagai bentuk kebutuhan jasmani.

Dalam karya sastra, penghidupan secara otomatis diekspresikan secara langsung dan tidak langsung secara etnis. Berbagai peribahasa menggali sumber daya alam sebagai bukti bahwa manusia dan alam memiliki hubungan yang tak terpisahkan.

Menurut Liliweri (2019, hlm. 26) mengemukakan bahwa sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi yang meliputi; berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, perdagangan.

1. Perburuan.

Berburu merupakan kegiatan pengejaran, penangkapan, atau membunuh hewan liar yang tujuannya untuk dimakan, hiburan, perdagangan, atau memanfaatkan hasil produknya (seperti kulit, susu, gading, dsb). Dalam penggunaannya, kata ini merujuk pada perburuan yang sah dan sesuai dengan hukum, sedangkan yang bertentangan dengan hukum disebut dengan perburuan liar (Soekanto, 2006, hlm. 176).

Menurut Koentjaraningrat (1992, hlm. 16) “Berburu merupakan salah satu aktivitas masyarakat yang telah berlangsung sejak zaman dahulu dan sampai saat ini masih tetap bertahan. Sampai sekarangpun aktivitas berburu masih menjadi sebuah tradisi yang masih dilakukan di beberapa daerah di Indonesia”.

2. Berternak.

Salah satu upaya manusia dalam memanfaatkan lingkungan fisik di sekitar ialah usaha peternakan. Berternak adalah salah satu kegiatan usaha yang diharapkan mendatangkan keuntungan bagi peternak (Mubarok, 2003, hlm. 141). Untuk hasil utama peternakan, umumnya berbentuk bahan pangan hewani, seperti daging, telur, dan susu. Misalnya daging kambing, telur ayam, susu sapi, dan lain sebagainya. Hasil samping peternakan merupakan bahan non-pangan, seperti kulit, tulang, tanduk, dan bulu hewan (Ihromi, 2013, hlm. 9).

3. Bertani.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber

energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya (Syariat, 2006, hlm. 459). Pertanian merupakan industri ekonomi penting di negara berkembang. Sektor pertanian merupakan sumber pemasukan yang diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan dan pendapatan dari sebagian besar penduduk negara-negara berkembang yang hidup di pedesaan (Mardikanto, 2007, hlm. 3). Bisnis peternakan ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

4. Menangkap ikan.

Penangkapan ikan adalah aktivitas menangkap ikan, aktivitas ini biasanya dilakukan oleh seorang nelayan. Nelayan merupakan sekelompok masyarakat yang hidupnya bergantung hasil melaut, entah itu dengan melakukan penangkapan atau membudidayakan ikan (Mulyadi, 2005, hlm. 75). Istilah menangkap ikan tidak berarti bahwa yang ditangkap adalah ikan, namun istilah ini juga mencakup *mollusca*, *cephalopoda*, *crustacea*, dan *echinoderm*, dan hewan laut yang ditangkap tidak selalu hewan laut yang hidup di alam liar (perikanan tangkap), tetapi juga ikan budidaya (Soekanto, 2006, hlm. 176).

Berdasarkan pendapat di atas sistem mata pencaharian meliputi berburu, berternak, bertani dan menangkap ikan.

C. Sistem Keekerabatan

Sistem kekerabatan di Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam dan kompleks. Sistem kekerabatan merupakan bagian penting dari cara masyarakat mengatur interaksi dan tanggung jawab antar anggota keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Di Indonesia, sistem kekerabatan didasarkan pada nilai-nilai sosial, adat istiadat, agama, dan tradisi yang berbeda-beda disetiap suku bangsa dan daerah. Sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat Indonesia yaitu:

1. *Patrilineal*.

Patrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau ayah, misalnya suku Batak (Soekanto, 2006, hlm. 177). Hal tersebut mengakibatkan bahwa setiap individu dalam masyarakat dari garis keturunan laki-laki masuk batas hubungan kerabat, sedangkan dari perempuan tidak termasuk batas tersebut (Koentjaraningrat, 1967, hlm. 125). Umumnya sistem kekerabatan *patrilineal* ini dianut oleh suku Batak, Bali, Lampung.

2. *Matrilineal*.

Matrilineal merupakan sistem garis keturunan yang menempatkan ibu sebagai penentu garis keturunan, misalnya suku Minangkabau (Ihromi, 2013, hlm. 10). Hal tersebut mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat dari garis keturunan ibu merupakan hubungan kerabat, selain itu tidak termasuk atau di luar batas hubungan kerabat (Koentjaraningrat, 1967, hlm. 125). Sistem kekerabatan *matrilineal*, biasanya dianut oleh masyarakat Minangkabau.

3. *Non Unilineal*.

Sistem kekerabatan lainnya ialah sistem kekerabatan *Non Unilineal* yaitu *Bilineal* dan *Bilateral*. Sistem kekerabatan *bilineal* mengakui dan mengikuti garis keturunan dari kedua sisi, baik pihak ibu maupun pihak ayah. Dalam sistem ini, seseorang memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga dari kedua orang tua. Dengan kata lain, individu dianggap memiliki keluarga kerabat dari pihak ibu dan pihak ayah secara bersamaan, sedangkan dalam sistem kekerabatan *bilateral* juga mengakui hubungan kekerabatan dari kedua sisi keluarga, tetapi tidak selalu mengikuti garis keturunan secara tegas. Dalam sistem ini, individu memiliki hubungan kekerabatan dengan semua anggota keluarga yang merasa dekat secara emosional, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah. Perbedaan utama antara kedua sistem ini terletak pada cara mereka memandang dan mengakui hubungan kekerabatan. Sistem kekerabatan *bilineal* lebih menekankan pada garis keturunan dan kedua sisi keluarga, sementara sistem kekerabatan *bilateral* lebih menekankan pada hubungan sosial dan emosional tanpa terlalu memperhatikan garis keturunan. Menurut Syariat (2006, hlm. 460) “sistem kekerabatan *Non Unilineal* berkenaan dengan prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui penghubung pria untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu”.

Berdasarkan pendapat di atas sistem kekerabatan meliputi *Patrilineal*, *Matrilineal* dan *Non Unilineal*.

D. Sistem Perkawinan

Sistem perkawinan di Indonesia juga mencerminkan keragaman budaya dan adat istiadat yang ada pada masyarakat Indonesia. Ada beberapa jenis sistem perkawinan yang umum ditemukan di Indonesia:

1. Endogami.

Endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Lebih jelasnya, perkawinan endogami ini adalah perkawinan antar kerabat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah saudara (patrilineal) atau dari ibu saudara (matrilineal) (Soekanto, 2006, hlm. 178).

2. Eksogami.

Eksogami adalah sebuah aturan sosial di mana perkawinan hanya diizinkan di luar sebuah kelompok sosial, kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Kelompok sosial tersebut mendefinisikan cakupan dan pendirian dari eksogami, dan aturan dan mekanisme yang diberlakukan berlangsung secara berkelanjutan (Ihromi, 2013:11).

Berdasarkan pendapat di atas sistem perkawinan meliputi endogami dan eksogami.

E. Bahasa

Bahasa merupakan alat penting dalam melakukan komunikasi, bahasa juga yang menjadikan manusia menjadi berbudaya. Menurut Ratna (dalam Khotimah, 2016, hlm. 40) “ Bahasa dalam arti seluas-luasnya merupakan warisan biologis tetapi proses perkembangannya terjadi melalui proses belajar”.

1. Lisan.

Lisan artinya dituturkan atau diucapkan. Dengan demikian maka lawan dari lisan adalah tulisan. Apabila lisan diujarkan melalui suara maka tulisan disampaikan melalui aksara. Lisan dan tulisan pada dasarnya saling melengkapi dalam konteks komunikasi sehari-hari dan dalam kaitannya dengan proses belajar dan mengajar (Soekanto, 2006, hlm. 179).

2. Tulisan.

Tulisan adalah hasil menulis atau karangan dalam majalah, surat kabar, buku, atau karya tulis lainnya. Tulisan adalah istilah dipakai untuk menyatakan karya tulis yang dibuat (Ihromi, 2013:12).

Berdasarkan pendapat di atas bahasa meliputi lisan yang diujarkan melalui suara dan tulisan yang disampaikan melalui aksara.

F. Kesenian

“Kesenian adalah perpaduan antara irama, nada, baik vokal suara atau syair yang dilantunkan manusia maupun alat yang dimainkan, alat musik yang berupa rangkaian nada atau gerakan yang diungkapkan dalam perasaan atau pesan yang diangkat” (Acep, 2012, hlm. 139). Seni seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan manusia tidak dapat dipisahkan dari seni. Dalam hal ini semua tentang seni, sastra, musik, tari, arsitektur, tekstil, lukisan dan patung. Menurut Ratna (dalam Khotimah 2017, hlm. 217) “kesenian mengacu pada nilai keindahan yang berasal dari ekspresi hasrat manusia terhadap keindahan”.

Menurut Nurochim dkk (2017, hlm. 27) “Antropologi menemukan bahwa pada setiap masyarakat kebudayaan mempunyai ungkapan seni berupa simbol pernyataan senang dan susah (suka duka). Seni dapat berupa sub unsur seperti adat istiadat, aktivitas sosial dan peralatan fisik terkait dengan seni rupa, seni suara, seni gerak, seni sastra, seni drama, dan sebagainya (Devi dkk, 2019, hlm. 123). Sejalan dengan itu, menurut Liliweri (2019, hlm. 27) “kesenian meliputi; seni patung/pahat, relief, lukis dan gambar, rias, vokal, musik, bangunan, kesusastraan, dan drama”.

Berdasarkan pendapat di atas kesenian meliputi seni lukis, seni rupa, seni pahat, lagu daerah, alat musik, tarian dan seni sastra.

2.1.4.3 Wujud kebudayaan

Wujud kebudayaan ada bermacam-macam contohnya adalah:

A. Tarian

Seni tari yaitu gerak badan secara berirama yang dilakukan di tempat serta waktu tertentu buat keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, serta pikiran. Bunyi-bunyian yang dimaksud musik pengiring tari mengatur gerakan penari serta menguatkan maksud yang mau disampaikan (Syariat, 2006, hlm. 461).

Setiap wilayah memiliki berbagai jenis tarian. Fungsinya bermacam-macam, ada tarian untuk menerima tamu adapun tarian untuk mengucap syukur atas rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Contohnya: tari serimpi, tari lilin dan sebagainya (Soekanto, 2006, hlm. 175).

B. Makanan daerah

Makanan tradisional merupakan makanan dan minuman, termasuk jajanan serta bahan campuran atau bahan yang digunakan secara tradisional, dan telah lama berkembang secara spesifik di daerah dan diolah dari resep-resep yang telah lama dikenal oleh masyarakat setempat dengan sumber bahan lokal serta memiliki citarasa yang relatif sesuai dengan selera masyarakat setempat (Ihromi, 2013, hlm. 9).

Makanan tradisional meliputi makanan sehari-hari, baik itu makanan pokok, lauk pauk maupun makanan khas yang diberikan oleh nenek moyang. Cara pengolahan pada resep makanan tradisional dan cita rasanya umumnya sudah bersifat turun temurun sehingga makanan tradisional disetiap tempat atau daerah berbeda-beda (Syariat, 2006, hlm. 458).

Setiap daerah memiliki cita rasa makanan yang berbeda. Walaupun bahan-bahannya sama tetapi dengan pengolahan yang berbeda bisa membedakan cita rasa buaatannya. Contoh-contoh makan daerah antara lain: Rendang (Padang), rujak petis, rawon (Jawa Timur), gado-gado (Jakarta), soto Makassar (Sulawesi Selatan) (Soekanto, 2006, hlm. 176).

1. Rumah adat.

Tempat tinggal di setiap daerah memiliki bentuk bangunan yang berbeda. Contohnya: rumah khas daerah padang adalah rumah gadang sedangkan rumah khas daerah Yogyakarta adalah rumah Joglo (Soekanto, 2006, hlm. 176).

2. Pakaian.

Setiap daerah memiliki ciri khas baju yang berbeda-beda yang digunakan pada acara pernikahan ataupun acara kekeluargaan. Contohnya: baju bodo (Sulawesi Selatan), kebaya (Jakarta) dan lain-lain (Soekanto, 2006, hlm. 176).

Berdasarkan uraian di atas, wujud kebudayaan menggambarkan setiap wilayah memiliki berbagai jenis makanan dan setiap daerah memiliki cita rasa makanan yang berbeda.

2.1.5 Kebudayaan Minang

Minangkabau adalah tempat di Indonesia di mana ada masyarakat yang diatur dan diatur oleh hukum ibu. Dimulai dari habitat yang paling tinggi, yaitu “Nagari”, kita dapat melihat bahwa faktor “darah keturunan melalui garis ibu”

merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakat, meskipun pada lingkungan yang terakhir, yaitu di dalam Nagari, kita menemukan faktor penghubung lainnya.

Jadi, jika ingin memahami struktur kehidupan masyarakat Minangkabau, pertama-tama harus dibayangkan suatu kehidupan sosial yang tersusun dalam urutan faktor-faktor yang terjadi “melalui garis keturunan ibu”. Menurut Anwar (1997, hlm. 1) yaitu walaupun organisasi masyarakat Minangkabau berdasarkan garis ibu, namun yang berkuasa di dalam kesatuan-kesatuan tersebut selalu orang laki-laki dari garis ibu, hanya saja kekuasaan selalu didasarkan atas mufakat seperti bunyi pepatah Minang:

Kamanakan barajo ka mamak

Mamak barajo ka mufakat.

Jadi yang berkuasa di dalam keluarga ialah mamak, saudara laki-laki yang tertua dari ibu. Semua anak laki-laki dan perempuan dari ibu serta saudara perempuan lain dari ibu, semuanya adalah kemenakan dari mamak tadi (Anwar, 1997, hlm. 10-11). Orang Minangkabau menyebut masyarakatnya dengan sebutan Alam Minangkabau dan budaya mereka Adat Minangkabau. Penyebutan demikian menunjukkan bahwa orang Minangkabau memandang dirinya (atau masyarakat) sebagai bagian dari alam, dan hukum alam yang ada sebagai bagian dari alam juga berlaku dalam masyarakat (alam) Minangkabau. Dasar filsafat mereka juga menunjukkan hal itu: Alam takambang jadi guru.

Menurut sifat dasarnya adat Minangkabau terdiri dari dua jenis (berdasarkan Tambo yang disistematisasikan oleh Esten (1999, hlm. 35) Pertama, Adat yang berbuhul mati. Adat ini tidak berubah, tidak mungkin dilanggar. Pepatah Minangkabau mengatakan bahwa adat ini tak lekang dan tak lapuk dek hujan. Ia tidak pernah berubah oleh situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Adat yang berbuhul mati ini terbagi atas:

1. Adat yang sebenarnya. Adat, yaitu seluruh hukum dan sifat alam.
2. Adat yang diadatkan, yaitu seluruh ajaran dari pendiri dan perumus Adat Minangkabau, yakni Datuk Katumanggungang dan Datuk Papatiah Nan Sabatang. Dalam menyusun ajarannya itu kedua Datuk itu berpegang kepada

Adat nan sebenarnya. Adab, kepada sifat dan hukum alam. Proses itulah kemudian disebut Alam Takambang Jadi Guru.

Kedua, Adat yang berbuhul sentak. Adat ini merupakan penjabaran dari adat berbuhul mati. Rumusan dan penjabaran ini itu dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah itulah yang menghasilkan norma atau aturan dan lembaga. Berbeda dengan kebanyakan budaya yang berkembang di dunia, budaya Minangkabau adalah masyarakat yang tribal dan bersuku-suku, demokratis, paternalistis, dan desentralistis (Esten, 1999, hlm. 28).

Berdasarkan uraian di atas, masyarakat Minangkabau berdasarkan garis ibu, namun yang berkuasa di dalam kesatuan-kesatuan tersebut selalu orang laki-laki dari garis ibu, hanya saja kekuasaan selalu didasarkan atas mufakat.

2.1.6 Perkawinan dan Perjudohan Minangkabau

Definisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapatkan keturunan (Bachtiar, 2004, hlm. 23). Perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat dilandasi rasa cinta yang mendalam dari kedua belah pihak untuk hidup dan kawin guna menjamin kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi.

Pola perjudohan yang khas pada manusia ialah dipengaruhi pola perjudohan oleh kebudayaan, sehingga pewarisan tidak lagi hanya biologis, tetapi juga kultural. Dalam kenyataan sehari-hari yang kita hadapi adalah pewarisan biokultural (Jacob, 2000, hlm. 86). Jacob melanjutkan bahwa perjudohan yang sesuai dengan keadaan-keadaan budaya disebut agathogami, dan yang bertentangan disebut kakogami. Satu bentuk kariogami adalah inses, yang merupakan satu bentuk perkawinan dengan kerabat dekat.

Bentuk kokogami yang lain *mesalliance*, yaitu antara pasangan yang kedudukan sosialnya tidak sama, ini dapat berupa perjudohan seorang wanita dengan lapisan atas dengan lapisan bawah (Jacob, 2000, hlm. 87). Hal inilah yang diterapkan oleh leluhur adat Minangkabau yang mengatur perjudohan sesuai

dengan garis keturunan biologis orang tersebut. Semakin dekat hubungan sosiologisnya semakin menuruti adat menurut mereka.

Di dalam tata susunan keluarga Minangkabau yang didasarkan atas hukum ibu, kita menjumpai hubungan tersendiri antara mamak dengan kemenakan/keponakan nya sehingga menimbulkan tertib bermamak-berkamanakan. Tertib bermamak-berkamanakan ini sebagaimana telah kita singgung pada bagian sebelumnya adalah merupakan kelanjutan saja dari tata susunan masyarakat Minangkabau yang didasarkan hukum ibu. (Anwar, 1997, hlm. 82).

Kita telah mengerti bahwa perkawinan menurut adat Minangkabau tidak memisahkan baik istri maupun si-suami dari lingkungan paruihnya. Anak-anak yang didapat dari jurai ibunya, yang jurai tersebut dikepalai oleh seorang mamak, sedangkan si-bapak adalah mamak pula di dalam parit-uniknya. Dapatlah kita anggap bahwa mamak ini adalah seolah-olah bapak bagi keluarga Minangkabau, dan oleh karena semua anak-anak dari ibu merupakan anggota jurai yang dikepalai oleh mamak tersebut, maka dapatlah dengan mudah dipahami adanya hubungan tersendiri antara mamak dengan kemenakan dan sebaliknya.

Akan tetapi janganlah orang lekas beranggapan bahwa dengan demikian si bapak melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap anaknya, karena sudah ada mamak dari anak-anak tersebut yang akan memimpin, tidak, sebab dari “kato pusako” di dalam undang-undang nan ampek kita menjumpai pituo yang merupakan dasar pedoman bagi kehidupan keluarga di Minangkabau, yaitu: anak dipangku kamanakan dibimbiang.

Apabila kamanakan yang telah kaya raya, berharta yang melimpah-limpah, wajib pulalah mamak ikut memikirkan pelaksanaan selanjutnya dari hal tersebut (Anwar, 1997, hlm. 83). Pertama-tama kewajiban mamak terhadap mereka adalah mengusahakan rumah buat keponakan-keponakannya. Apabila rumah keluarga telah sempit, mamak mencari tempat baru yang lebih besar. Selain itu mamak adalah penyelenggara kepentingan dari moril kemenakan-kemenakannya, di dalam kesulitan-kesulitan dia menolong memberi jalan mengatasi kesukaran-kesukaran tersebut memberi nasihat serta petunjuk-petunjuk kepada mereka.

Mamak harus mencari jodoh kamanakan-kemenakannya yang perempuan tepat pada waktunya dan setelah persesuaian dengan segenap anggota

keluarga dengan mamak juga diputuskan siapakah yang diambil sebagai urang sumando (Anwar, 1997, hlm. 85). Menurut Esten (1999, hlm. 36) berdasarkan Tambo Minangkabau melukiskan tahap itu sebagai berikut:

1. Tahap ketika nenek moyang orang Minangkabau membat hutan serta membangun teratak juga dusun. Waktu itu berlaku hukum jahiliah: Siapa yang kuat berkuasa dan siapa yang cepat mendapat.
2. Tahap ketika dusun telah berkembang menjadi kampung. Ketika hukum tarik menarik berlaku, dikatakan: Hutang emas dibayar emas, hutang budi dibayar budi, hutang nyawa dibayar nyawa.
3. Tahap ketika kampung atau koto telah berkembang menjadi Nagari. Nagari berkembang menjadi Luhak, maka terbentuklah Luhak Nan Tigo dan Lareh Nan Duo yang menjadi inti alam Minangkabau. Pada fase ini kedua Datuk pendiri Adat Minangkabau tersebut merumuskan prinsip-prinsip Adat Minangkabau.

Hukum alur dan patut dan sistem kekerabatan matrilineal disusun. Waktu inilah dirumuskan ajaran adat yang mengatakan:

Kamanakan barajo ka mamak,
Mamak barajo ka manggarai,
Tunggara barajo ka Panghulu,
Panghulu barajo ka Alua jo Patuik,
Alua jo Patuik barajo ka Bana,
Bana badiri dengan sendirinya.

Terjemahannya:

Kemenakan beraja kepada mamak,
Mamak beraja kepada tunggara,
Tunggara beraja kepada Penghulu,
Pengkulu beraja kepada Mufakat,
Mufakat beraja pada Alur dan Patut,
Alur dan Patut beraja kepada Benar,
Benar berdiri dengan sendirinya.

Ajaran di atas menunjukkan bahwa adat Minangkabau sangat menjunjung tinggi aturan mengenai pernikahan turun temurun yang masih memiliki hubungan darah. Pernikahan yang terjalin antara keponakan dan anak dari mamak akan berlabuh pada kebenaran.

2.1.7 Warna Lokal dan Representasi

Definisi warna lokal berasal dari istilah warna dan lokal. Istilah warna merupakan corak atau ragam (karakter sesuatu), sedangkan lokal adalah setempat atau terjadi disuatu tempat/tidak merata. Warna lokal merupakan representasi cermat mengenai latar, dialek, adat kebiasaan, cara berpakaian, cara berpikir, cara merasa, dan sebagainya yang khas dari suatu daerah tertentu yang terdapat dalam

cerita (Abrams, 1981, hlm. 98). Warna lokal Minangkabau dapat diartikan sebagai lukisan yang cermat mengenai latar, dialek, adat kebiasaan, cara berpakaian, cara berpikir, cara merasa, dan sebagainya yang khas dari budaya Minangkabau. Oleh sebab itu, untuk mengenali warna lokal dalam karya sastra pemahaman falsafah kebudayaan dari bangsa pelaku cerita sangat diperlukan. Falsafah itu terbentuk dari alam pikiran dan pandangan hidup sosial dari bangsa tersebut (Navis, 1994, hlm. 44).

Dalam karya sastra, kemunculan warna lokal tersebut menjadikan latar sebagai unsur yang paling dominan atau fokus utama dalam karya yang bersangkutan. Selanjutnya, latar ini akan mempengaruhi alur, penokohan, serta masalah dan tema yang kemudian terpadu pada keseluruhan cerita (Nurgiyantoro, 1998, hlm. 228).

Latar sosial budaya umumnya terbentuk dalam tokoh yang ditampilkan, sistem kemasyarakatan, adat istiadat, pandangan masyarakat, kesenian, dan benda-benda kebudayaan yang terungkap dalam karya sastra (Pradopo, 1987, hlm. 234). Unsur-unsur pembangun pada karya sastra merupakan hal yang diperhatikan dalam karya sastra warna lokal, umumnya karya sastra warna lokal paling banyak dapat dijumpai pada unsur latar. Sebagaimana disampaikan oleh Navis (1983, hlm. 43) bahwa “Warna lokal dalam karya sastra ditentukan oleh beberapa unsur, antara lain latar atau tempat berlangsungnya cerita, asal-usul pengarang, nama pelaku, serta nama panggilan yang digunakan”. “Selain itu, cara berpakaian, adat-istiadat, cara berpikir, lingkungan hidup, sejarah, cerita rakyat, dan kepercayaan juga termasuk unsur warna lokal” (Sastrowardoyo, 1999, hlm. 78).

Unsur-unsur tersebut mendominasi untuk mengungkapkan warna lokal dalam karya sastra. Warna lokal karya sastra tercermin pada unsur-unsur latarnya. Ada juga unsur lain, tetapi unsur latarlah yang lebih mengekspresikan warna lokal, terutama di lingkungan sosial. Lingkungan sosial mengacu pada masalah yang berkaitan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di tempat yang digambarkan dalam novel.

Tata cara hidup meliputi berbagai masalah yang cakupannya cukup kompleks, yang berupa gaya, kebiasaan, adat istiadat, tradisi, kepercayaan, cara berpikir, sikap, dan lain-lain yang tergolong latar spiritual. Selain itu, latar sosial

juga mengacu pada status sosial tokoh yang bersangkutan (Nurgiyantoro, 1998, hlm. 233).

Dengan demikian, sebagai bagian dari aliran realisme, sastra warna lokal hanya memberikan informasi permukaan tentang lokasi tertentu dengan menggambarkan elemen-elemen yang tampak hanya sebagai dekorasi, tanpa mempelajari kehidupan nyata di sana. Pakaian, ucapan, kebiasaan sehari-hari, perangai, dan topografi adalah elemen yang dibahas.

Berdasarkan paparan di atas, warna lokal dapat ditentukan melalui beberapa unsur, di antaranya latar tempat berlangsungnya cerita, unsur sosial, serta adat istiadat yang digunakan sehari-hari.

2.1.8 Hakikat Pancasila

Pancasila bisa juga ditafsirkan sebagai agama publik di Indonesia. Ungkapan agama publik bersumber pada keyakinan Pancasila dari nilai-nilai yang dianggap publik (kebaikan publik agama). Mulai dari Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan yang merupakan rukun agama. Semua hal menyangkut soal-soal agama sebagaimana terkandung dalam agama publik pernyataan ini diutarakan oleh Benyamin F. Intan (di dalam Arif, 2018, hlm. 32). Menurut Syaiful Arif Agama yang dimaksud di sini memiliki dua makna yaitu eksistensial dan fungsional. “Definisi pertama adalah bahwa agama dijadikan sebagai nilai yang memiliki eksistensial tersendiri. Di mana agama ini berpegang teguh pada kitab suci, Rasul, ritual dan umat sedangkan jika dari definisi kedua agama dapat dilihat dari sisi manfaatnya yaitu dapat bermanfaat secara personal maupun sosial” (Arif, 2018, hlm. 33).

“Semua agama yang ada di Indonesia tentu mempunyai eksistensialnya sendiri antara yang satu dengan yang lainnya berbeda, begitu pula dengan fungsi dan manfaatnya” (Arif, 2018, hlm. 34). Di atas, diskusi tentang agama publik lebih berfokus pada definisi kedua tentang agama dari perspektif utilitas. Jika keuntungan adalah keuntungan sosial atau fungsi sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agama publik atau pancasila mencakup gagasan bahwa itu adalah pencipta atau titik tolak, di mana nilai-nilai diciptakan, dan di mana nilai-nilai itu mewakili cara hidup masyarakat yang baik. Dengan kata lain, Pancasila dimaksudkan untuk

dimaknai sebagai agama publik daripada agama pribadi karena ia mencakup semua aspek keagamaan dari berbagai agama.

Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa dasar utama dari "agama publik" Pancasila adalah sila pertama Pancasila, yang menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Muh.Yamin dalam (Kusumastuti, 2019, hlm. 208) “Pancasila memiliki dua makna yaitu panca yang memiliki arti lima, dan sila yang berarti batu sendi atau landasan”. Aturan perilaku atau karakter yang baik, penting atau tidak senonoh itu disebut susila baik dalam bahasa ibu maupun bahasa Jawa, yang berpengaruh pada moralitas (Sarinah, 2016, hlm. 3). “Secara terminologis Pancasila dimaknai sebagai penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan subjek tertentu” (Kusumastuti, 2019, hlm. 208). Dengan begitu, Pancasila dipandang menjadi istilah dalam suatu keadaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara historis, Pancasila dimulai dengan sidang pertama BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai tokoh pendiri Indonesia. Sesi ini berujung pada pembahasan berupa calon garis besar dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian pembicaranya adalah Muh. Yamin, Soepomo dan Soekarno. Pertemuan ini berlangsung pada tanggal 1 Juni 1945, dan untuk merayakan hari itu, Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Saat itu, Soekarno berpidato tentang calon negara Indonesia untuk pendidikan dasar. Nama Pancasila sendiri diadopsi atas saran seorang sahabat, Ir. Soekarno, ahli bahasa. Setelah peristiwa ini, kemerdekaan Indonesia dideklarasikan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, disetujui pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) yang memuat lima sila, yaitu Pancasila. Sejak itu, istilah pancasila dikenal masyarakat luas.

Pancasila ditetapkan menurut Pembukaan UUD 1945, Alenia IV, sebagai dasar negara, yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk mendirikan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah seluruh Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian dan untuk ikut serta mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial, kemerdekaan bangsa Indonesia diabadikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang dibentuk pada saat berdirinya Negara Republik Indonesia. Inilah kedaulatan rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan pemikiran kemasyarakatan yang benar dan rakyat yang benar yang dipimpin oleh rakyat.

Berikut merupakan definisi dari Pancasila menurut para ahli (Sujatmika, 2020, hlm. 23) sebagai berikut: 1) Menurut Soekarno, pancasila adalah sesuatu yang ditemukan dan dibawa keluar dari kehidupan bangsa Indonesia, yang menjadi dasar falsafah Indonesia merdeka karena didasarkan atau mengakar pada bangsa Indonesia. 2) Menurut Notonegoro, pancasila, secara umum dipahami, adalah dasar negara yang absolut dan objektif, yang tidak dapat diubah oleh negara yang tetap.

Berdasarkan penjelasan dan pengertian Pancasila di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah keyakinan yang dipegang oleh semua orang Indonesia dan dianggap sebagai agama umum yang menawarkan aturan perilaku yang bertujuan untuk mempelajari dan meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, pancasila adalah dasar negara yang berasal dari bangsa Indonesia. Negara ini didirikan secara mutlak dan objektif demi kelangsungan hidup Republik Indonesia.

Secara ontologis, hakikat pancasila didasarkan pada setiap sila pancasila yang meliputi: Tuhan, Manusia, Persatuan, Kewarganegaraan dan Keadilan (Tomalili, 2019, hlm. 51). Hal ini tentu saja menjadikan alasan bahwa setiap tatanan Pancasila harus berkaitan dan berhubungan dengan hakikat dan hakikat negara Indonesia. Jadi, permohonan pertama dengan ketuhanan mengacu pada keadaan bangsa Indonesia yang beriman, permohonan kedua dengan kemanusiaan mengacu pada sifat manusia dan tindakannya, permohonan ketiga dengan persatuan mengacu pada negara bangsa Indonesia, yang akan tetap bersatu sesuai dengan semboyan negara kita Bineka Tunggal Ika, permohonan keempat dengan keadilan dan kepentingan terakhir mengacu pada keadilan dan kepentingan terakhir dengan keadilan kewarganegaraan mengacu pada keadilan dan kepentingan akhir.

Wujud implementasi Pancasila sendiri memiliki bentuk hirarki piramidal. Maksud dari bentuk piramida hirarkis adalah bahwa perintah pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi pedoman bagi perintah-perintah yang lain,

yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, semua perintah harus selaras dengan perintah pertama, yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pancasila merupakan salah satu dasar negara, yang menjadi pedoman pembangunan berkelanjutan di segala bidang kehidupan, termasuk politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu poin terapan yang sangat penting, khususnya pendidikan karakter. Tren terbaru dalam pendidikan karakter adalah penggunaan profil pelajar pancasila.

2.1.9 Konsep Profil Pelajar Pancasila

Adanya pandemi bukan menjadi alasan bagi para guru untuk terus memperjuangkan pendidikan. Apalagi di masa pandemi ini, banyak cara untuk memperjuangkan pendidikan. Salah satunya adalah berbagai aplikasi dan lingkungan belajar seperti *Zoom*, *Google Meet*, dan *Google Classroom*. Aplikasi dan media pembelajaran di atas merupakan salah satu ciri *self-directed learning*, yang menggunakan berbagai sumber belajar dan berbagai trainer di manapun di dunia yang dapat bertatap muka.

Dalam penerapannya, belajar mandiri membutuhkan gotong royong. Salah satu aspek penting untuk keberhasilan belajar mandiri adalah gotong royong. Sistem gotong royong ini tercipta antara pemerintah, pendidik dan peserta didik dalam mengumpulkan, menyiarkan dan menerima.

Carl Rogers (dalam Nadiroh, 2020, hlm. 2) mengatakan bahwa *self-directed learning* mengacu pada lima unsur, yaitu:

1) partisipasi aktif peserta didik, 2) inisiatif, 3) pembelajaran bermakna, 4) evaluasi pembelajaran, dan 5) kebutuhan pembelajaran, sedangkan dari sudut pandang Elaine B. Johnson, belajar mandiri mengacu pada tiga konsep, yaitu:

1) ketergantungan, 2) diferensiasi. 3) Mengatur diri sendiri masih ada perspektif lain tentang belajar mandiri yaitu cara pandang Mezirow yang menyimpulkan bahwa belajar mandiri berkaitan dengan keadaan pikiran yang baru, cara pandang yang berubah, kebiasaan dan pemikiran kolaboratif.

Ki Hajar Dewantara (Wiwoho & Situngkir, 2020, hlm. 86) menjelaskan bahwa karakter merupakan kunci terpenting bagi perkembangan manusia yang

terlatih, sekaligus memperhatikan dan mengembangkan keterampilannya. Konsep belajar mandiri Ki Hajar Dewantara memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar dengan membebaskannya dari hal-hal yang disukai atau diminati bahkan kemampuannya. Konsep belajar mandiri diilhami oleh bapak pendidikan nasional Indonesia yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara “Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handyaani”. Dari pernyataan di atas jelaslah bahwa guru memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembentukan nilai-nilai karakter peserta didiknya. Pendidikan merupakan panutan ketika berada di depan, menjadi motivator atau ruh, ketika berada di tengah, guru menjadi penggerak peserta didik ketika mereka berdiri di belakang dengan berbagai dukungan agar peserta didik dapat mandiri (Nugroho et al, 2020, hlm. 88).

Dengan menerapkan profil siswa Pancasila dalam pendidikan, pendidik dapat ditunjukkan bertanggung jawab untuk membangun nilai-nilai karakter. Profil siswa Pancasila ini dapat diterapkan dari usia dini hingga perguruan tinggi. Namun, jika dipisahkan dari lingkup sekolah, profil siswa Pancasila juga dapat disebut sebagai pendidikan sepanjang hayat, yaitu pendidikan yang berlangsung hingga akhir hayat seseorang.

Profil pelajar Pancasila merupakan salah satu amanat Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1. 20/2018 tentang penataan profil pelajar Pancasila. Dalam arahan dan visinya beliau menyampaikan bahwa “sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, berkarakter kuat dan berakhlak mulia, inovatif dan teknis”. Pembentukan profil pelajar Pancasila dilandasi oleh para pendidik karakter yang lama kelamaan mulai terpuruk dan semakin dilupakan. Melalui pembinaan karakter ini, para pelajar Pancasila menjadi profil bangsa Indonesia di tingkat nasional dan internasional.

Pedoman ke mana arah tujuan pendidikan disebut juga dengan profil pelajar pancasila. Mengetahui arah sebelumnya penting agar anda tahu apa yang diharapkan guru dari peserta didik mereka ketika mereka meninggalkan lembaga pendidikan. Sumber daya manusia yang unggul adalah tujuan akhir dari profil pelajar Pancasila. Peserta didik dianggap unggul apabila menerapkan pembelajaran

sepanjang hayat yang berkompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pertama, iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia meliputi unsur-unsur kunci, yaitu:

Penting untuk menggunakan iman dan spiritualitas karena keduanya dapat berfungsi sebagai panduan dan tempat bersandar untuk kekuatan yang lebih kuat. Adanya iman dan spiritualitas membantu orang dan memberi kekuatan untuk menyelesaikan semua masalah. Moralitas atau akhlak pribadi adalah ukuran dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah yang kita lakukan benar atau salah. Melalui muatan agama, pendidikan karakter membentuk pribadi-pribadi yang kodrati sebagai hamba Tuhan (Sutinah, 2020, hlm. 36).

Pendidikan karakter berfokus pada pendidikan psikologis dan spiritual. Penerapan terhadap akhlak pribadi akan menghilangkan bibit korupsi di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Akan tetapi hal ini harus didasari terhadap kemampuan peserta didik untuk memahami dan mengerti bentuk nyata dari akhlak pribadi, akhlak kepada manusia dapat dikatakan sebagai perbuatan kita sebagai sesama manusia dan sikap kita terhadap sesama manusia, setelah menerapkan akhlak kepada sesama manusia penting halnya juga menerapkan akhlak kepada alam. Alam merupakan bagian hidup kita dalam hal sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu kita harus bisa hidup berdampingan tanpa saling merugikan. Moralitas negara mengacu pada kewarganegaraan yang baik dari sikap dan tindakan kita. Jadi ciri dari Profil Pelajar Pancasila yang pertama merupakan hal yang terpenting untuk diterapkan karena sehabat-hebatnya manusia dan sukses apapun manusia itu, apabila tidak menerapkan poin ini maka tidak ada gunanya. Generasi yang mengabaikan poin ini tentu akan merugikan tatanan negara, baik akhlak maupun moral, masyarakat dan alam. Aspek religius dalam proses belajar ini akan semakin memperkuat pembentukan karakter peserta didik karena pendidikan karakter bukan semata hanya fisik semata tetapi juga psikis dan hati (Sutinah, 2020, hlm. 36).

Kedua, berkebinekaan global didasari oleh semboyan negara kita Indonesia yaitu Bineka Tunggal Ika. Wujud nyatanya yaitu kemampuan peserta didik dalam mencintai perbedaan. Budaya, agama, suku, ras, warna kulit merupakan bentuk dari

perbedaan yang harus dicintai oleh peserta didik. Tanpa mendefinisikannya, toleransi sangat diperlukan dan bahkan menjadi prasyarat untuk membangun sebuah negara, terutama karena keragaman suku, tradisi dan adat istiadat, serta agama dan kepercayaan (Shihab, 2019, hlm. 283). Jika hal ini diterapkan tentunya akan menghasilkan generasi yang sukses dalam kehidupannya. Di dalam penerapannya juga harus mengadakan komunikasi yang baik dan dapat berinteraksi dengan antar budaya. Keberadaan sikap toleransi sangat diperlukan dalam kehidupan baik keluarga, bermasyarakat maupun bernegara bahkan dalam berinteraksi di dalam komunitas global (Shihab, 2019, hlm. 281). Dan keberadaan dari toleransi sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia.

Ketiga, gotong royong merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dalam team dan berkolaborasi untuk menjadikan segala pekerjaan menjadi mudah, cepat dan ringan. Gotong royong memiliki ciri kerakyatan, sama dengan penggunaan demokrasi, persatuan, keterbukaan, kebersamaan dan atau kerakyatan itu sendiri (Widayati, 2020, hlm. 4). Jadi, gotong royong ini sesuai dengan masyarakat Indonesia. Di dalam gotong royong juga harus menumbuhkan sikap peduli terhadap satu sama lainnya. Sikap saling berbagi juga penting untuk mensukseskan gotong royong. Nilai gotong royong mengajarkan peserta didik untuk berempati terhadap manusia yang lainnya. Empati ini bertujuan untuk mengerti emosi orang lain. “Gotong royong merupakan sebuah sistem kerja yang diadopsi dari binatang merayap yaitu semut, yang patut untuk kita pertahankan dan kita teruskan pada era sekarang ini” (Widiawati dkk, 2020, hlm. 5). Sejak dini, peserta didik akan menjadikan nilai gotong royong kebiasaan di lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja mereka.

Keempat, kemampuan untuk menghasilkan konsep, karya, dan tindakan yang unik dan unik adalah salah satu cara peserta didik memiliki kemampuan kreatif. Salah satu hal yang sangat penting adalah kreatif karena dapat memengaruhi masa depan. Legenda Apple Steve Jobs menyebutkan bahwa kreativitas merupakan tentang menghubungkan titik-titik (Pratama, 2019, hlm. 26). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kreativitas merupakan pusat dari tersambungannya beberapa titik. Kreatif adalah usaha memiliki daya cipta: memiliki kemampuan untuk menciptakan: bersifat (mengandung) daya cipta: pekerjaan yang

menghendaki kecerdasan dan imajinasi (Pablo, 2018, hlm. 11). Untuk memiliki sifat kreatif, peserta didik harus memiliki kemampuan mencipta dan berimajinasi.

Kelima, berpikir kritis adalah kemampuan memecahkan masalah dan mengolah informasi (Lismaya, 2019, hlm. 8). Wujud nyata bernalar kritis adalah peserta didik yang mengolah informasi terlebih dahulu sebelum dapat diterima oleh pemikirannya. Seorang anak yang bernalar kritis akan menganalisis suatu informasi sebelum mengambil sebuah keputusan apakah informasi tersebut dapat diterima apa tidak. Kemampuan berpikir kritis anak dalam memecahkan masalah dikaji dalam analisis.

Pada dasarnya berpikir kritis atau *critical thinking* didefinisikan sebagai proses intelektual dalam mengonseptualisasikan, mengimplementasikan, mensintesis dan/atau mengevaluasi informasi yang diperoleh melalui observasi, pengalaman, refleksi, pemikiran dan komunikasi sebagai dasar untuk meyakini dan melakukan suatu tindakan (Lismaya, 2019, hlm. 8).

Semua data olahan yang diperoleh melalui kegiatan berupa observasi atau komunikasi merupakan hasil dari pertimbangan kritis. Mengelompokkan cara berpikir manusia ke dalam berbagai bagian, yaitu: berpikir vertikal, berpikir lateral, berpikir kritis, berpikir analitis, berpikir strategis, berpikir tentang hasil, dan berpikir kreatif. Menurut keduanya, berpikir kritis adalah berlatih atau memasukkan penelitian atau evaluasi yang cermat, seperti menilai kelayakan suatu gagasan atau produk (Maulana, 2017, hlm. 5-6).

Keenam, kemandirian adalah kesadaran diri akan tanggung jawab terhadap proses dan hasil belajar. Peserta didik yang berjuang untuk kemandirian selalu sadar diri, sadar akan kebutuhan dan kekurangannya, serta sadar akan situasi atau keadaan yang dihadapinya. Peserta didik juga memiliki kapasitas pengaturan diri, yang diwujudkan dalam kemampuan untuk membatasi diri pada hal-hal yang menyenangkan mereka. Dengan cara ini, peserta didik mengetahui kapan mereka dapat melakukan apa yang mereka sukai dan kapan mereka tidak dapat melakukannya. Pada akhirnya, peserta didik yang mandiri akan termotivasi untuk mencapai prestasi. Belajar berdasarkan kemandirian didefinisikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung karena didorong oleh kemauan sendiri, keputusan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. (Serevina, 2020, hlm. 199). Jadi, kemandirian tumbuh

dari diri kita sendiri. Bukan dari orang tuanya, gurunya, atau temannya, tetapi dari dirinya sendiri. Haris Mujiman di dalam Joni Raka juga Belajar mandiri dimungkinkan melalui kegiatan belajar aktif yang didorong oleh keinginan untuk menguasai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. (severina, 2021, hlm. 200). Hasil kompetensi yang diinginkan sangat dipengaruhi oleh niat atau motif.

Keinginan Kemendikbud dalam mengimplementasikan Profil Pelajar Pancasila adalah menjadikan Profil Pelajar Pancasila sebagai budaya dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Mewujudkan harapan tersebut dapat diwujudkan dengan peserta didik yang memahami, memahami dan dapat menerapkan Profil Pelajar Pancasila dalam studinya, kehidupan profesional dan kehidupan sehari-hari. Wujud yang dapat dicapai oleh negara Indonesia di masa depan adalah budaya yang produktif, budaya yang lebih terbuka dan budaya yang saling merangkul dan memperbaiki diri. Penerapan profil pelajar pancasila ini juga harus diterapkan pada tenaga pendidik. Karena guru adalah panutan yang paling utama bagi peserta didik. Untuk membuat Profil Pelajar Pancasila yang efektif, peserta didik harus banyak bertanya, berusaha keras dan bekerja keras. Proses yang dilakukan untuk melatih peserta didik menerapkan, mencoba dan mengerjakan banyak soal berlangsung selama proses pembelajaran terutama pada tingkat dasar.

2.1.10 Profil Pancasila dan Berkebinekaan

A. Profil Pancasila

Kemendikbud Ristek No. 162/M/2021 mengenai perubahan Kurikulum dan kebijakan pendidikan tentang pengenalan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini merupakan pilihan terakhir dan dapat diperkenalkan disatuan pendidikan pada periode 2022-2024. Kebijakan ini muncul akibat menurunnya kualitas pembelajaran di dunia pendidikan selama pandemi Covid-19 yang dikenal dengan istilah (*learning loss*). Menurut (Suryadien et al, 2022, hlm.12), Kurikulum Merdeka adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dapat mendukung pemulihan pembelajaran melalui kegiatan intrakurikuler dan pelengkap kokurikuler (proyek).

Dalam kurikulum ini terdapat program yang disebut “Profil Pelajar Pancasila”, yang merupakan bentuk pembelajaran sepanjang hayat yang berkompeten, sesuai karakter dan perilaku dengan nilai-nilai Pancasila (Kemendikbud Ristek, 2022). Profil Pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab

pertanyaan besar peserta didik tentang keterampilan apa yang ingin mereka kembangkan. Hal ini tentunya berkaitan dengan visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui penciptaan peserta didik Indonesia. Pembentukan profil pelajar pancasila dilandasi oleh rendahnya sumber daya manusia yang memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila bidang pendidikan dan terlupakan.

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membantu peserta didik mencapai potensinya. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 3 Pendidikan Nasional, khususnya Pendidikan Nasional, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik agar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta menjadi negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peran pendidikan nasional bukan hanya kemampuan belajar dan penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik.

Perspektif lain yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara adalah “Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani”. Hal ini berarti bahwa guru memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik dalam pendidikan. Pendidikan menjadi panutan yang baik ketika berada di depan, menjadi motivator ketika berada di tengah, dan guru menjadi penggerak bagi peserta didik di belakangnya (Rahayuningsih, 2019, hlm. 132). Menurut kurikulum Merdeka, memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan, guru, dan peserta didik untuk belajar dengan cara yang fleksibel dan menyenangkan. Ini berarti Anda mengambil pendekatan pembelajaran mandiri berdasarkan minat dan kemampuan sambil berinvestasi dalam pembangunan karakter melalui program Profil Pelajar Pancasila.

Profil Pelajar Pancasila diimplementasikan di satuan pendidikan melalui kegiatan budaya, pendidikan, kokurikuler (projek) dan ekstrakurikuler.

B. Berkebinekaan Global

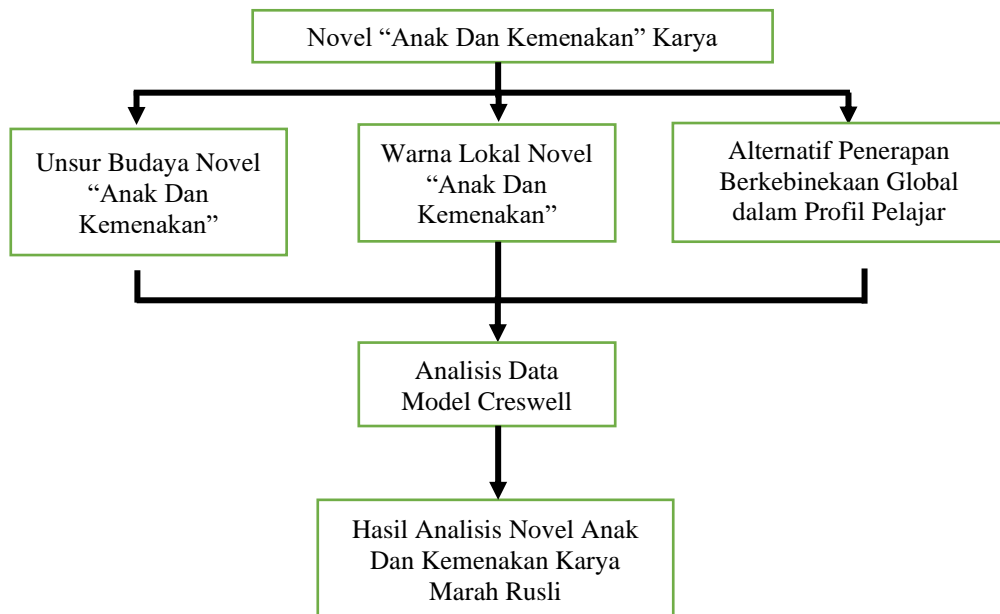
Bineka berarti keragaman, dan keragaman memiliki makna yang berbeda sejauh keragaman yang ada (KBBI, 1986, hlm. 163). Melalui profil tersebut, individu diharapkan memiliki identitas diri yang matang, serta budaya luhur

bangsanya dan terbuka terhadap keragaman budaya orang lain (Juliani & Bastian, 2021, hlm. 321).

Hal ini mengacu pada semboyan bangsa Indonesia yaitu “Bineka Tunggal Ika”, yang merupakan salah satu perwujudan dari menghargai perbedaan agama, suku, ras dan budaya yang harus diakui dan dihormati. Tidak ada paksaan dan keragaman ini tidak hanya menjadi dasar untuk memahami budaya sendiri, tetapi juga untuk budaya antar budaya.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka acuan berpikir adalah perencanaan pelaksanaan penelitian yang digagas oleh penulis dalam proses penelitian. Kerangka kerja yang dirancang oleh penulis berfungsi sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian agar proses penelitian tidak menyimpang dari pedoman yang tertuang dalam kerangka tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir